

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal abad ke 20 banyak bermunculan organisasi pergerakan dengan berbagai corak dan fokus yang berbeda. Hal ini berawal dari perubahan politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang memberlakukan Politik Balas Budi atau lebih akrab disebut Politik Etis. Ratu Wilhelmina dari Belanda, pada 17 September 1901 mengeluarkan kebijakan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis untuk kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Kebijakan itu muncul akibat kritik keras dari politisi asal Belanda atas praktek Tanam Paksa yang dilakukan Belanda kepada wilayah jajahan. Politik balas budi resmi berakhir tahun 1942, yakni saat Belanda terusir oleh Jepang dari Hindia Belanda.

Pada tahun 1904 Gubernur Jendral Idenburg mengutus Van Deventer dan temannya yang seorang pendukung Politik Balas Budi membuat ikhtisar keadaan wilayah jajahan. Ikhtisar tersebut dibuat dengan menunggu hasil verifikasi kolonisasi yang telah menyengsarakan rakyat, laporan tersebut dibuat oleh Van Deventer selanjutnya menjadi sebagian usulan, tetapi mendapat pertentangan dari kaum Liberal dan Demokrat Radikal. Pengairan, kredit pertanian, dan emigrasi mendapat perhatian, tetapi tidak dengan pendidikan yang justru diabaikan (Niel, 1984: 58).¹

¹ Susilo, Agus & Isbandiyah. 2018. *Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia*. *Jurnal HISTORIA*, 6(2), 5-6

Dalam penerapannya pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat jajahannya atau pribumi untuk mendapat penghidupan yang lebih manusiawi yakni dengan menyediakan layanan edukasi (pendidikan), emigrasi (perpindahan penduduk), dan irigasi (pengairan). Layanan irigasi berguna untuk meningkatkan produksi pertanian yang dikelola di Hindia Belanda dengan membangun aliran air, bendungan dan sebagainya. Layanan emigrasi diterapkan untuk pemerataan penduduk di wilayah jajahan. Perpindahan penduduk yang memiliki wilayah padat ke wilayah yang lebih sedikit, seperti dari Jawa ke Sumatra dan Kalimantan. Layanan edukasi atau pendidikan menjadi kebijakan yang sangat berpengaruh bagi masa depan masyarakat pribumi. Layanan ini juga yang mendorong pribumi untuk berpikir merdeka dan memerdekakan diri dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda.

Sebelum berlakunya politik etis pendidikan hanya diperuntukan untuk bangsa Eropa, Indo, dan Priyayi. Setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut, pemerintah membangun sekolah-sekolah bagi masyarakat jajahan. Meskipun terlihat baik, namun pendidikan yang diberikan lebih mengarah ke pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di wilayah jajahan. Salah satu contohnya adalah dengan dibangunnya sekolah dokter untuk menciptakan tenaga ahli yang murah. Hal ini dibuat agar pemerintah tidak mengeluarkan dana yang besar untuk mempekerjakan dokter dari Eropa. Selain membangun sekolah untuk pribumi di wilayah jajahan, pemerintah Kolonial juga memfasilitasi pribumi untuk melanjutkan pendidikan di negeri Belanda.

Dari penerapan politik balas budi tersebut pribumi mulai meningkatkan daya kritis hingga mendirikan perkumpulan atau organisasi pergerakan dengan bermacam-macam fokus gerakan seperti Sosial, Politik, Budaya, Ekonomi dan sebagainya. Organisasi progresif masa itu diantaranya, Budi Utomo yang lebih fokus pada golongan Priyayi dan budaya Jawa; Sarekat Islam yang lebih menonjol pada Ekonomi karena pada waktu itu menjalin hubungan dengan para pedagang Islam khususnya pedagang batik; *Indische Partij* berfokus pada politik yang condong kepada kepentingan *Inlander* yang sangat aktif mengkritisi kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda; Muhammadiyah sebagai organisasi Sosial keagamaan, yang lebih fokus pada dakwah Islam dan kesejahteraan umat; serta masih banyak organisasi pergerakan lainnya.

Di sebuah kampung kecil di Yogyakarta, muncul seorang ulama yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat di kampungnya. Ia adalah Muhammad Darwis, sepulang melaksanakan ibadah haji, namanya diganti menjadi Ahmad Dahlan. Aktivitasnya dalam dunia dakwah membawanya untuk bergabung dengan organisasi Budi Utomo. Lewat pengalamannya di sana, ia mempelajari pembentukan dan kegiatan-kegiatan organisasi modern. Keaktifan dan penyampaiannya yang menarik membuat pengurus Budi Utomo yang juga seorang guru dari *Kweekschool* Jetis mengajaknya untuk mengajar agama Islam di sekolah tersebut. Dari sana pengalamannya semakin terasah dan pada suatu titik diperlukan untuk membuat suatu organisasi Islam modern yang mampu untuk menjawab persoalan yang dialami masyarakat di sekitarnya. Organisasi itulah yang kita kenal sekarang sebagai Muhammadiyah.

Secara bahasa Muhammadiyah terdiri dari dua kata yaitu “Muhammad” dan “Iyah” yang berasal dari bahasa Arab. Kata “Muhammad” diambil dari Nabi Muhammad SAW dan “Iyah” berarti pengikut, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah ialah pengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan rekannya di Kauman Yogyakarta pada 18 November 1912.² Tujuan berdirinya ialah dengan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yakni kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Pada masa awal berdiri, Muhammadiyah sangat memperhatikan kesenjangan masyarakat di sekitar, hal ini bisa dilihat dengan didirikannya PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem). Dalam praktiknya PKO ada untuk menolong orang yang lemah seperti melalui didirikannya Rumah Sakit, Rumah Yatim, dan Rumah Sakit, termasuk dengan gerakan pengumpulan zakat.

Selain memiliki PKO yang fokus pada kesejahteraan masyarakat, Muhammadiyah juga mempunyai bagian lain, seperti sekolah, tabligh, dan taman pustaka. Bagian Sekolah merupakan bagian yang berkaitan dengan urusan pendidikan dan sekolah Muhammadiyah. Bagian tabligh merupakan bagian yang berkaitan dengan urusan penyiaran dan pengajaran agama Islam. Bagian taman pustaka merupakan bagian yang berkaitan dengan karang mengarang, penerbitan,

² Syarifuddin Jurdi, dkk. *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. (Jakarta: Kompas 2010) 1-2

penyiaran dan salah satu produk yang dihasilkan dari bagian ini adalah majalah Suara Muhammadiyah.³

Selain itu, Muhammadiyah juga memberikan wahana gerak dakwah untuk kaum wanita dengan mendirikan bagian “Aisyiyah” atau “Muhammadiyah Istri” sebagai upaya untuk menjembatani suara kaum wanita. Adapun bagian Penolong Haji untuk memandu masyarakat yang menunaikan ibadah di Makkah dan Madinah. Langkah awal Muhammadiyah dengan mengirim Fakhruddin ke Arab Saudi untuk mengamati segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bagian baru ini.⁴

Sudah lebih dari satu abad Muhammadiyah berdiri dan hingga kini masih membawa semangat yang sama yaitu Sosial keagamaan. Kontribusinya bagi Bangsa serta Negara sangat banyak, meliputi aset benda dan aset tidak benda. Aset tidak benda ialah para tokoh Bangsa yang mewakafkan dirinya untuk Negara dalam berbagai peristiwa seperti; Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia; Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoensia) dan BPUPKI (Ban Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan); Soedirman sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang sangat aktif perang gerilya pasca penyerahan Jepang; HAMKA sebagai ulama dan gerilyawan masa revolusi kemerdekaan; dan sebagainya.

³ Yuristiadhi, Ghifari. 2015. *Aktivisme Hoofdbestuur Muhammadiyah Bagian PKO di Yogyakarta Sebagai Representasi Gerakan Pelayanan Sosial Masyarakat Sipil (1920-1931)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 11(2), 197

⁴ Op. cit. Jurdi. hlm. 53

Aset benda (Amal Usaha Muhammadiyah) meliputi Rumah Sakit, Sekolah, Perguruan Tinggi, Panti Jompo, Panti Asuhan dan sebagainya. Aset Sekolah yang dimiliki Muhammadiyah adalah 3.334 yang tersebar di seluruh Negara Indonesia dengan perincian berikut:

- SD (Sekolah Dasar) : 1094 bangunan sekolah
- SMP (Sekolah Menengah Pertama) : 1128 bangunan sekolah
- SMA (Sekolah Menengah Atas) : 558 bangunan sekolah
- SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) : 554 bangunan sekolah⁵

Bahkan tidak sedikit Amal Usaha Muhammadiyah yang didirikan di wilayah-wilayah yang bukan mayoritas Islam. Hal ini membuktikan bahwa Muhammadiyah tidak membedakan suku, bangsa, ras dan golongan untuk bersama membangun Indonesia dan dunia.

Sejak berdirinya hingga kini, Muhammadiyah tetap membawa semangat yang sama yakni memerangi kemungkaran dan memajukan kemanusiaan. Salah satu yang terkenal dari gerakan Muhammadiyah ialah memerangi TBC (Tahayul, Bid'ah, Churafat) yang masih banyak dilakukan masyarakat. Selain itu, teologi surat Al-Maun menjadi landasan untuk mengembangkan gerakan Muhammadiyah dalam hal kemanusiaan. Dengan langkah tersebut Muhammadiyah mempunyai keinginan untuk mewujudkan masyarakat Islam

⁵

Jumlah Sekolah Muhammadiyah
<https://dikdasmenppmuhammadiyah.org/dapodikmu-jumlah-sekolah> (diakses pada 9 Januari 2023 pukul 13.00)

yang sebenar-benarnya yakni kembali kepada kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Dari uraian di atas tersebut diketahui, bahwa Muhammadiyah sudah masuk ke berbagai lini kehidupan bangsa Indonesia. Organisasi yang lebih dahulu berdiri dari Indonesia ini namun masih sedikit penulisan sejarah Muhammadiyah dalam lingkup lokal atau kedaerahan. Selain itu, kecamatan Tanggulangin menjadi salah satu cabang Muhammadiyah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki basis massa terbesar. Disamping itu, organisasi ini ikut serta dalam melewati masa-masa yang mengancam keutuhan bangsa. Dari pernyataan tersebut mendorong peneliti untuk menyelesaikan penelitian Sejarah Muhammadiyah di Tanggulangin.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana awal mula berdirinya Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin?
2. Bagaimana peran Muhammadiyah pada bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Kecamatan Tanggulangin?

C. Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan lingkup penelitian, hal ini dibuat untuk memberikan batasan agar penelitian tetap fokus pada pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Ruang lingkup yang dimaksud di sini terbagi menjadi

tiga meliputi, *temporal* (waktu), *spasial* (lokasi atau tempat), dan materi (isi atau muatan).

Lingkup penelitian *temporal* (waktu) dalam penelitian sejarah Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin mengambil tahun 1960—2020. Penelitian dimulai tahun 1960 karena pada tahun tersebut awal berdirinya Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin. Penelitian diakhiri pada tahun 2020 karena terdapat Pandemi Covid-19 yang dirasakan seluruh dunia dan tentu berpengaruh pada Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin. Di antara tahun tersebut terdapat peristiwa besar yang terjadi skala nasional seperti Gerakan 30 September, Reformasi 1998, Tragedi Lumpur Lapindo, dan masih banyak lagi. Dari pernyataan di atas, dapat diakumulasikan bahwa penelitian ini memiliki rentang waktu 60 tahun.

Lingkup penelitian spasial (tempat) dalam penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan lingkup penelitian materi (muatan atau isi) dalam penelitian ini berfokus pada awal mula berdirinya, penyebaran, dan peran Muhammadiyah di bidang pendidikan, sosial dan keagamaan di Kecamatan Tanggulangin.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami awal mula berdirinya Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin

2. Untuk memahami peran Muhammadiyah pada bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Kecamatan Tanggulangin

E. Manfaat Penelitian

Dari uraian di atas, peneliti berharap penelitian ini membawa manfaat berikut:

1. Mengungkap berdirinya Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin
2. Memahami peran Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin
3. Menghadirkan sejarah Muhammadiyah di lingkup kedaerahan atau lokal

F. Tinjauan Pustaka

Pada suatu penelitian perlu adanya tinjauan pustaka dalam hal ini peneliti mengambil referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan Muhammadiyah, Sosial, dan Sejarah. Tinjauan pustaka yang dimuat dalam penelitian ini berguna untuk bahan pendukung maupun menjadi sumber relevan penelitian. Adapun tinjauan pustaka yang peneliti masukkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Syarifuddin Jurdi, dkk. 1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan, penerbit Kompas.

Buku ini berisi enam bab yang menjelaskan tentang sejarah Muhammadiyah secara luas atau lingkup nasional mulai dari berdirinya tahun 1912 sampai tahun 2010. Pada bab pertama berisi gagasan satu abad Muhammadiyah. Bab kedua berisi dinamika awal berdirinya

muhammadiyah, mulai dari kondisi masyarakat, dunia Islam hingga hubungan Muhammadiyah dengan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

Bab ketiga berisi Muhammadiyah periode awal sampai masa Jepang, membahas tentang pencarian jati diri, landasan dan membangun pondasi awal organisasi serta perluasan wilayah dan keanggotaan. Bab keempat berisi dinamika sosial, politik dan keagamaan Muhammadiyah periode kemerdekaan sampai peristiwa 1965. Dalam bab ini membahas tentang peran Muhammadiyah dalam pembuatan dasar negara Republik Indonesia, pendirian partai Masyumi, kedekatan dengan pemerintah hingga pergolakan politik dan Gertapu/PKI.

Bab kelima berisi perkembangan Muhammadiyah pasca peristiwa 65 sampai 1985. Bab ini membahas perubahan konsolidasi Ideologi Gerakan, perubahan sosial budaya dan politik Indonesia yang mempengaruhi kondisi Muhammadiyah. Bab keenam berisi dinamika periode 1985-2010. Bab ini membahas dinamika Muhammadiyah pada masa Orde Baru sampai Reformasi. Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik Indonesia masa Reformasi.

2. Achmad Jainuri. Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad XX, penerbit UMSIDA Perss.

Buku yang ditulis oleh Achmad Jainuri ini merupakan hasil untuk mencapai gelar sarjannya di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Surabaya. Di dalamnya memuat sejarah Muhammadiyah secara umum

atau dalam lingkup nasional dari awal berdirinya organisasi tersebut. Adapun beberapa bab penting yang dimuat dalam buku ini yaitu latar belakang gerakan Muhammadiyah yang memuat kontinuitas dan perubahan dalam Islam di Jawa, pengaruh Timur Tengah, dan politik Islam Belanda. KH Ahmad Dahlan yang memuat riwayat hidup, pendidikan, kepribadian, riwayat perjuangan, dan beberapa pandangan terhadap KH. Ahmad Dahlan; Muhammadiyah yang memuat masa pertumbuhan, masa perkembangan, pembaruan, serta Muhammadiyah dengan gerakan reformis yang lain. Reaksi terhadap gerakan Muhammadiyah yang memuat reaksi dari golongan Islam tradisional dan reaksi terhadap ide pembaruan Muhammadiyah.

3. Ahmad Anton R.W, dkk, Proses Difusi Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin Di Era Orde Baru Hingga Masa Reformasi, penerbit Andalusia.

Buku ini berisi tentang sejarah Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin melalui pengakuan para tokoh dan penelusuran dari masa Orde Baru hingga masa Reformasi. Pada proses penelitian buku ini dilakukan pada bulan Ramadhan tahun 2021. Tim peneliti melakukan wawancara mendalam kepada tokoh Muhammadiyah setempat.

4. Ahmad Mansur Suryanegara. Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penerbit Salamadani Pustaka Semesta.

Buku ini berisikan fakta sejarah perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat empat bab sebagai berikut: 1. Pengaruh kebangkitan Islam di Indonesia, 2. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara Indonesia, 3. Peran kekuasaan politik Islam melawan imperialisme barat, dan 4. Peran Ulama dalam gerakan kebangkitan kesadaran nasional (1900—1942 M).

Bab pertama lebih berfokus pada perkembangan dunia Islam yang terjadi di luar Indonesia. Secara garis besar bab ini dimulai dari jaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib), Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, Khilafah Fatimiyah, Kesultanan Turki Ottoman, serta ekspansi Genghis Khan. Dari penjelasan sebelumnya, latar tempat yang diambil dalam bab ini lebih banyak di Timur Tengah.

Bab keduanya dalam buku ini membahas tentang masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia. Secara garis besar bab ini membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, teori-teori yang menyertai (Gujarat, Mekah, Persia, Cina, Maritim), perkembangan kekuasaan politik Islam dan tasawuf, perkembangan Islam serta kebangkitan kekuasaan Islam di Indonesia. Pada bab ini penulis sudah memakai latar tempat Indonesia sebagai fokus kajiannya.

Bab ketiga mulai membahas peran kekuasaan politik Islam melawan imperialisme barat. Dimunculkan banyak perselisihan dan ekspansi keberbagai wilayah serta menjadi bab yang paling kompleks. Latar tempat

dalam bab ketiga sangat meluas meliputi hampir seluruh dunia. Pernyataan ini dapat dilihat dari sub bab yang memuat wilayah Timur Tengah, Amerika dan Eropa. Pembahasan yang berlatar tempat di Indonesia lebih banyak bersinggungan dengan kolonial Hindia Belanda. Dalam bab ini terdapat banyak perang terhadap VOC dan Belanda, seperti perang Padri, perang Lampung, perang Banjarmasin, perang Batak, perang Atjeh serta muncul sosok pemecah belah yaitu Snouck Hurgronje dalam perang Atjeh.

Bab keempat atau bab terakhir dalam buku ini membahas tentang peran Ulama dalam gerakan kebangkitan kesadaran nasional. Latar waktu mencakup awal abad XX sampai datangnya Jepang ke Indonesia yaitu 1942. Secara garis besar bab ini memuat organisasi-organisasi pergerakan Islam yang berdiri serta sikap dan peranya setelah berlakunya kebijakan politik balas budi yang dibuat pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut: Sjarikat Dagang Islam (Sjarikat Islam), Moehammadijah, Persjatikatan Oelama, Pergerakan Tarbijah Islamijah, Nahdlatoeel Oelama (NU), Persatoean Islam (PERSIS), Jong Islamieten Bond, serta masih banyak lagi.

5. Sartono Kartodirdjo, dkk. Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (1900—1942), penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Buku ini berisi tentang masa-masa akhir atau menjelang kejatuhan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia sampai masa kebangkitan

nasional. Di dalamnya terdapat empat bab besar yaitu, Politik Kolonial Belanda dan Transformasi Politik, Struktur Sosial, Pergerakan Nasional, dan Komunikasi Sosial dan Edukasi. Empat bab tersebut memuat pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama terdapat empat sub bab, sub bab pertama membahas tentang dari VOC ke pemerintah Hindia Belanda yang memuat system tanam paksa, politik etis, dan gagasan baru mengenai fungsi jajahan. Sub bab kedua membahas tentang perkembangan politik kesejahteraan 1900-1918 yang memuat kemerosotan politik etis dan politik asosial, politik konservatif dan politik progresif, politik sistim barat—timur dan politik terhadap Islam, dan kegagalan politik etis. Sub bab ketiga membahas tentang politik reaksioner 1918-1930 yang memuat janji van Limburg Stirum, dan politik penindasan. Serta bab keempat membahas tentang dasawarsa terakhir Hindia Belanda 1930-1942 yang memuat dalam bayang depresi ekonomi dunia, meningkatnya politik reaksioner, frustasi pada pihak Pergerakan Nasional, dan politik non-akulturatif.

Bab kedua terdapat tiga sub bab, sub bab pertama membahas tentang struktur sosial ekonomis yang memuat pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan gejala sosial-ekonomi, pelebaran diferensiasi kerja, dan migrasi intern dan ekstern. Sub bab kedua membahas tentang penyebaran pengajaran dan mobilitas sosial yang memuat pertumbuhan sekolah pemerintah dan bersubsidi, perguruan tinggi dalam dan luar negeri, sekolah swasta yang tak bersubsidi, latarbelakang sosial murid sekolah pemerintah,

dan sekolah, kesempatan, dan mobilitas sosial. Serta sub bab ketiga membahas tentang peralihan status sosial yang memuat pelebaran birokrasi dan Indonesianisasi dalam kepegawaian, dan status sosial lingkungan supra-
desa.

Bab ketiga terdapat tiga sub bab yakni membahas tentang awal perkembangan memuat Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indisch Partij, dan Gerakan Pemuda; masa radikal memuat Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia; masa bertahan memuat fraksi nasional, petisi Sutardjo, gabungan politik Indonesia.

Bab keempat terdapat tiga sub bab: sub bab pertama membahas tentang mendidik bangsa sendiri yang memuat pendidikan wanita, Taman Siswa, Sekolah Sarekat Islam, Ksatrian Instituut, Ruang Pendidikan INS-Kayutaman, dan Perguruan Rakyat. Sub bab kedua membahas tentang Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa yang memuat perkembangan bahasa Indonesia, dan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sub bab ketiga membahas tentang perkembangan pers Indonesia yang memuat perkembangan awal: pers daerah dan bahasa melayu, pers pembawa suara organisasi politik, sebuah pandangan profesional, dan masa akhir Hindia Belanda.

6. Sartono Kartodirdjo, dkk. Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942—1070), penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jilid keenam merupakan bagian terakhir buku Sejarah Nasional Indonesia ini mengandung masalah-masalah khusus yang menyangkut sifat periodenya yang lazim disebut *contemporary history* atau sejarah sejaman. Periode yang di dalam masyarakat secara populer disebut jaman Jepang dan Jaman Kemerdekaan Indonesia. Buku ini memiliki tiga bab besar yaitu tinjauan menyeluruh dari jaman Jepang sampai demokrasi terpimpin; jaman Jepang; dan Republic Indonesia.

Adapun sub bab dalam tiap babnya sebagai berikut, bab pertama memiliki empat sub bab. Sub bab pertama jaman Jepang yang memuat tentara Jepang masuk ke Indonesia, usaha menanam kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, janji kemerdekaan serta *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPKI dan badan lainya, serta menjelang Proklamsi. Sub bab kedua membahas tentang periode perang kemerdekaan yang memuat perjuangan awal, melawan aksi militer Belanda pertama, menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia, serta melawan aksi militer Belanda kedua dan menuju pengakuan kedaulatan. Sub bab ketiga membahas tentang periode dekomrasi liberal yang memuat periode sebelum pemilihan umum I serta sejak pemilihan umum I. sub bab terakhir membahas tentang periode demokrasi terpimpin yang memuat kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kekuatan politik dalam konstelasi Demokrasi Terpimpin, keadaan ekonomi dan politik luar negeri, pembebasan Irian Jaya, konfrontasi Malaysia dan ke luar dari Persyarikatan Bangsa-Bangsa, serta Gerakan 30 September (G.30.S/PKI)

Bab kedua memiliki empat sub bab, sub bab pertama membahas tentang perubahan sosial dan mobilitas sosial yang memuat mobilitas sosial kaum muda dan golongan-golongan lain. Sub bab kedua membahas tentang ekonomi perang yang memuat penguasaan dan pengawasan kegiatan ekonomi serta keuangan, perdagangan, dan produksi. Sub bab ketiga membahas tentang struktur pemerintahan dan kehidupan politik. Sub bab terakhir membahas tentang pendidikan dan komunikasi sosial.

Bab ketiga memiliki enam sub bab, sub bab pertama membahas tentang pendidikan dan komunikasi sosial yang memuat stratifikasi sosial dan mobilitas vertikal serta horizontal. Sub bab kedua membahas tentang perkembangan ekonomi yang memuat pemikiran dan pelaksanaan ekonomi Indonesia. Sub bab ketiga membahas tentang struktur pemerintahan dan kehidupan politik. Sub bab keempat membahas tentang pendidikan dan komunikasi sosial yang memuat pendidikan, perkembangan bahasa Indonesia, perkembangan seni, dan media komunikasi massa. Sub bab kelima membahas tentang hubungan luar negeri Republik Indonesia yang memuat situasi dunia setelah Perang Dunia II, politik bebas-aktif dalam prinsip dan praktek. Sub bab terakhir membahas tentang pertahanan keamanan nasional dan Dwifungsi ABRI yang memuat pertahanan keamanan Nasional Indonesia dan Dwifungsi ABRI.

7. Kuntowijoyo. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, penerbit IRCiSoD dan Mata Bangsa

Buku ini merupakan kumpulan karangan Dr. Kuntowijoyo yang hadir di tengah banjirnya karya terjemahan, hadirnya gagasan dan pemikiran orisinal dari cendekiawan kita sendiri, sebagai sesuatu yang telah lama didambakan. Terutama untuk menjelaskan dan menjawab derasnya arus perkembangan masyarakat kita yang semakin kompleks, sementara kalangan cendekiawan kita masih sedikit yang mengulurkan pena untuk menulisnya.

Karya Dr. Kuntowijoyo ini terdapat empat bab sebagai berikut: bab pertama membahas Dimensi masa lalu dan masa kini, memuat: 1. Kawulo, Wong Cilik, Umat, dan Warganegara; 2. Islam sebagai suatu ide; 3. Posisi Islam di tengah pertarungan serba ideologi dunia; 4. Islam dan masa depan masyarakat industri di Indonesia. Bab kedua membahas tentang merumuskan tantangan dan pemihakan, memuat 1. Perlunya peta kondisi: merumuskan pijakan sosial; 2. Dimensi-dimensi pergerakan Islam di Indonesia; 3. Membendung arus fragmentasi sosial. Bab ketiga membahas munculnya format baru memuat: 1. Kecenderungan baru kepemimpinan Islam; 2. Kecendekiawan dan kepemimpinan professional; 3. Peranan cendekiawan Muslim dalam proses transformasi sosial; 4. Tugas cendekiawan Muslim dalam masyarakat teknokratis. Bab keempat sekaligus menjadi bab terakhir membahas Mengembalikan peranan masjid memuat: 1. Masjid sebagai pusat gerakan; 2. Masyarakat dan Jama'ah.

Jadi, dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan hal yang saling berkaitan yaitu, sama-sama memuat tentang Sejarah, Sosial, serta

Muhammadiyah. Selain mengambil referensi dari buku-buku yang telah disebutkan di atas, peneliti juga mengambil sumber jurnal ilmiah sumber lisan melalui wawancara tokoh Muhammadiyah yang mempunyai kredibilitas di lokasi penelitian.

G. Metode Penelitian

Pada suatu penelitian perlu adanya metode penelitian, hal ini bertujuan memudahkan untuk menyusun penelitian dari awal sampai akhir. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sejarah. Adapun tahapan pelaksanaan yaitu: pemilihan topik, kritik sumber, *heuristic*, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Adapun maksud dari tahapan tersebut akan dijelaskan pada poin-poin sebagai berikut:

Tahap pemilihan topik merupakan tahap awal pada penelitian. Pada tahap ini peneliti memilih topik yang sesuai dengan penelitian agar tetap pada pokok permasalahan penelitian. Tahap kritik sumber dilakukan untuk memilih sumber yang dibutuhkan dan tidak sebelum melakukan pengumpulan data dari lapangan. Hal ini dilakukan guna peneliti tidak kehabisan waktu dan tenaga dalam pengumpulan data, karena dalam tahap ini peneliti menentukan data yang menjadi prioritas dan tidak.

Heuristik meliputi pengumpulan sumber tulis maupun sumber lisan yang relevan sebagai bahan penelitian sejarah Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin. Sumber tulis yang dimaksud seperti buku, jurnal, arsip organisasi

dan sebagainya, sedangkan sumber lisan didapatkan melalui wawancara para tokoh Muhammadiyah penting setempat.

Setelah sumber terkumpul, peneliti melakukan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti memilih dan memilah sumber-sumber yang sudah didapatkan serta relevan dengan penelitian. Verifikasi ini berguna agar penelitian tetap pada pembahasan awal dan tidak keluar dari ruang lingkup penelitian.

Tahap interpretasi, tahap ini peneliti melakukan penafsiran melalui sumber yang sudah didapat. Tahap historiografi, ini adalah tahap akhir dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini, peneliti menuliskan sumber-sumber yang sudah didapatkan selama penelitian melalui tahap di atas. Penulisan sejarah ini harus melalui tahapan-tahapan tersebut dan relevan dengan penelitian yakni tentang sejarah Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangti tahun 1960—2020.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, berikut penjelasannya:

1. BAB I yaitu pendahuluan yang memuat:

Latar belakang, Rumusan masalah, Lingkup penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan

2. BAB II yaitu gambaran umum yang memuat:

- a. Letak geografis

Deskripsi Tanggulangin, Peristiwa yang pernah terjadi, Desa-desa di Tanggulangin, Kondisi sosial masyarakat

b. Profil Organisasi Muhammadiyah

Deskripsi Muhammadiyah, Maksud dan Tujuan serta Usaha, Lambang Organisasi, Organisasi Otonom, Tokoh Pimpinan, Struktur Kelembagaan, dan Cabang Muhammadiyah Luar Indonesia

3. BAB III yaitu Muhammadiyah dan Perkembangannya

Sejarah organisasi Muhammadiyah: Indonesia masa Kolonial Belanda, Kemurnian ajaran Islam masa Kolonial Belanda, Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Berdirinya Muhammadiyah, Pengakuan dan perluasan wilayah Muhammadiyah, Pendirian bidang di Muhammadiyah

4. BAB IV yaitu sejarah Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin yang memuat:

a. Awal mula berdirinya Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin

Masuknya Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin, penyebaran dan dinamika di beberapa ranting, pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965

b. Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin masa Orde Baru

Kondisi Muhammadiyah, penyebaran dan dinamika di beberapa ranting

c. Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin masa Reformasi

Kondisi Muhammadiyah, Majelis-majelis yang dimiliki, Amal Usaha Muhammadiyah/Aset, Pencapaian

d. Muhammadiyah di Kecamatan Tanggulangin masa COVID-19

Kondisi masyarakat, sikap Muhammadiyah, pembentukan MCCC, Gerakan MCCC.

e. Muhammadiyah untuk Indonesia

Muhammadiyah Sebagai Gerakan Sosial, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Ekonomi Umat, Politik Pro Aktif Muhammadiyah, Budaya dalam Perspektif Muhammadiyah

BAB V yaitu penutup yang memuat: simpulan dan saran.

